

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini juga sampai pada sebuah refleksi kritis terhadap kerangka teori yang digunakan. Sebagaimana diisyaratkan, teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash secara ideal menekankan pada proses perumusan keputusan yang bersifat kolektif sejak awal. Hal ini menunjukkan adanya sedikit ketidakcocokan dengan kasus implementasi PMT-AS, di mana keputusan awal untuk meluncurkan program ini diambil secara sepihak oleh pemerintah (*top-down*), dan pelibatan aktor lain seperti masyarakat dan swasta baru terjadi secara intensif pada tahap implementasi.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap mempertahankan penggunaan teori Ansell dan Gash bukan sebagai label kaku untuk mendefinisikan kasus ini, melainkan sebagai sebuah alat analisis (*analytical tool*) yang terbukti sangat efektif. Kerangka Ansell dan Gash sangat berguna untuk membedah dan mengukur elemen-elemen kunci dalam proses kolaborasi yang faktanya memang terjadi di lapangan—seperti dinamika dialog tatap muka, proses membangun kepercayaan, peran kepemimpinan fasilitatif, hingga pencapaian pemahaman bersama. Dengan kata lain, teori ini tetap relevan digunakan untuk menganalisis 'bagaimana'

kolaborasi itu berjalan dan dikelola dalam praktiknya, terlepas dari 'bagaimana' keputusan awalnya dibuat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Jakarta Selatan pada periode 2019–2022, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan *collaborative governance*. Menggunakan pendekatan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang berfokus pada indikator *starting conditions*, *institutional design*, dan *collaborative process*, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting.

Pertama, dari segi bentuk kolaborasi, pelaksanaan PMT-AS di Jakarta Selatan memperlihatkan sinergi yang cukup kuat antara pemerintah daerah (terutama Dinas dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan), masyarakat (yang direpresentasikan oleh komite sekolah sebagai pelaksana langsung di lapangan), dan sektor swasta lokal (UMKM) yang dilibatkan secara informal sebagai penyedia makanan dan bahan pangan. Pemerintah memainkan peran fasilitator kebijakan, penyedia regulasi dan pengawasan, sementara masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana aktif, dan sektor swasta sebagai mitra teknis. Model ini menunjukkan implementasi prinsip-prinsip collaborative governance, khususnya dalam hal *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, dan *shared understanding*.

Kedua, kolaborasi ini didukung oleh komitmen dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah menunjukkan komitmennya melalui penyediaan pendampingan teknis, evaluasi, dan mekanisme kontraktual dengan komite sekolah. Komite sekolah, walau menghadapi keterbatasan dalam kapasitas administratif, tetap menjalankan peran pelaksana dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam menyusun RAB, mengelola dana, hingga mengatur pengadaan dan distribusi makanan. Kepercayaan dibangun melalui transparansi pelaporan dan komunikasi rutin antara Sudin dan pelaksana.

Ketiga, dari sisi tantangan, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan struktural dan teknis. Hambatan struktural meliputi keterlambatan juknis dari Dinas Pendidikan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan, serta belum optimalnya forum kolaborasi formal lintas sektor. Hambatan teknis meliputi perbedaan kapasitas antar pelaksana, kurangnya pemahaman komite terhadap sistem administrasi publik, dan kendala adaptasi menu terhadap kondisi siswa. Meski demikian, beberapa tantangan ini berhasil diatasi dengan pendekatan dialog dan fleksibilitas kebijakan di tingkat pelaksana.

Keempat, pelibatan sektor swasta belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan PMT-AS secara formal. Keterlibatan mereka bersifat relasional dan inisiatif dari pihak komite, bukan bagian dari desain institusional pemerintah. Ini membuka ruang pengembangan kolaborasi yang lebih inklusif dan terstruktur di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT-AS di Jakarta Selatan dapat dikategorikan sebagai bentuk praktik collaborative governance yang adaptif dan partisipatif. Namun, agar prinsip kolaborasi ini lebih kuat dan efektif, dibutuhkan penguatan desain kelembagaan yang mampu memperkuat *starting conditions*, memperjelas pembagian peran, serta membangun forum deliberatif yang berkelanjutan.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Untuk Implementasi Kebijakan PMT-AS di Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk peningkatan pelaksanaan collaborative governance dalam kebijakan PMT-AS:

1. Meningkatkan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan

Dinas Pendidikan perlu mempertimbangkan mekanisme untuk mengikutsertakan komite sekolah atau perwakilan masyarakat dalam tahap awal penyusunan kebijakan, seperti perumusan juknis, agar dapat memperkuat rasa kepemilikan dan menumbuhkan shared understanding yang lebih kokoh.

2. Memperkuat kapasitas teknis jajaran komite sekolah sebagai pelaksana

Pemerintah daerah, melalui Sudin Pendidikan, disarankan untuk menyusun modul pelatihan rutin bagi komite sekolah, terutama terkait pengelolaan dana publik, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pemahaman atas regulasi administrasi.

3. Membentuk forum koordinasi lintas aktor secara berkala

Perlu dibentuk forum rutin yang melibatkan Dinas Pendidikan, Sudin, komite sekolah, dan pelaku swasta untuk berbagi evaluasi dan praktik terbaik. Hal ini akan memperkuat proses dialog, mempercepat penyelesaian konflik, dan memperkaya pemahaman kolektif antar aktor.

4. Mendorong formalitas keterlibatan sektor swasta

Pemerintah perlu merancang skema kemitraan yang memungkinkan sektor swasta lokal (seperti UMKM pangan) dilibatkan secara resmi dan transparan sebagai mitra pengadaan dalam program PMT-AS, guna memperkuat aspek keberlanjutan ekonomi lokal.

5. Memperbaiki sistem peringatan dini dan distribusi juknis

Untuk menghindari keterlambatan teknis, Dinas Pendidikan disarankan menyusun jadwal tetap pengeluaran juknis sebelum tahun ajaran dimulai, agar sekolah dan komite dapat menyiapkan pelaksanaan lebih matang.

4.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Penerapan Teori *Policy Networks* dari Rhodes: Sesuai saran penguji, penelitian berikutnya dapat menggunakan kerangka *Policy Networks* dari R.A.W. Rhodes sebagai teori utama. Penelitian dapat berfokus pada: "Bagaimana peta jaringan aktor dalam implementasi PMT-AS, dan bagaimana distribusi kekuasaan serta saling ketergantungan sumber daya (*resource dependency*) di antara pemerintah, komite sekolah, dan swasta memengaruhi hasil akhir kebijakan?".

Pendekatan ini akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai struktur kekuasaan dan interaksi di dalam jaringan tata kelola.

2. Studi Kuantitatif dan Dampak Kebijakan: Penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif mengenai *proses* kolaborasi. Untuk melengkapinya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed-methods*) untuk mengukur dampak dan efektivitas dari model kolaborasi PMT-AS. Pertanyaan yang bisa dijawab antara lain: "Seberapa signifikan program ini dalam meningkatkan status gizi siswa?" atau "Bagaimana dampak ekonomi dari pelibatan UMKM lokal dalam program ini?".
3. Analisis Kolaborasi dalam Kebijakan *Top-Down*: Penguji secara tepat menyoroti bahwa teori Ansell dan Gash idealnya diterapkan pada kebijakan yang keputusannya diambil secara kolektif. Penelitian selanjutnya dapat secara spesifik meneliti fenomena ini dengan pertanyaan: "Bagaimana dinamika *collaborative governance* berkembang pada kebijakan yang diawali secara *top-down*? Faktor-faktor apa yang mendorong atau menghambat transformasi dari implementasi hierarkis menjadi kolaborasi yang otentik di lapangan?". Ini akan menguji batas dan fleksibilitas teori Ansell & Gash dalam konteks negara berkembang.
4. Studi Kasus Komparatif: Penelitian ini terbatas pada konteks urban Jakarta Selatan. Studi komparatif sangat diperlukan untuk membandingkan bagaimana model kolaborasi ini berjalan di wilayah dengan karakteristik berbeda,

misalnya di daerah perdesaan atau di kota dengan kapasitas fiskal dan birokrasi yang lebih rendah. Ini akan menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana model kolaborasi ini dapat direplikasi dan faktor kontekstual apa yang paling memengaruhinya.

5. Studi Longitudinal Mengenai Evolusi Kebijakan: Ditemukan adanya pergeseran kebijakan ke arah swakelola pada tahun 2023 yang membatasi keterlibatan swasta. Penelitian longitudinal dapat mengkaji dampak jangka panjang dari perubahan ini dengan pertanyaan: "Bagaimana pergeseran kebijakan dari model kolaboratif inklusif ke model yang lebih terbatas memengaruhi keberlanjutan program, kepercayaan antar aktor, dan pemberdayaan ekonomi lokal?". Penelitian ini akan sangat berharga untuk memahami evolusi dan keberlanjutan dari sebuah tata kelola kolaboratif.

4.3 Keterbatasan Riset

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan:

1. Keterbatasan wilayah studi

Fokus penelitian ini terbatas pada Jakarta Selatan, sehingga belum mencerminkan pelaksanaan kolaboratif PMT-AS di wilayah administrasi Jakarta lainnya. Padahal dinamika antar wilayah dapat berbeda tergantung pada konteks sosial dan birokrasi lokal.

2. Keterbatasan jumlah narasumber

Penelitian ini bergantung pada data primer dari wawancara dengan sejumlah aktor terbatas. Meski sudah mewakili aktor kunci (Sudin, komite, sekolah, dan pelaku swasta), jumlah dan keberagaman narasumber masih bisa ditingkatkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan triangulasi yang lebih kuat.

3. Belum menjangkau analisis kuantitatif atas dampak program

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, sehingga belum menyajikan data kuantitatif terkait keberhasilan PMT-AS seperti perubahan gizi siswa, efektivitas biaya, atau dampak ekonomi terhadap UMKM.

4. Waktu penelitian yang terbatas

Periode pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak mencerminkan dinamika program dari tahun ke tahun secara longitudinal. Dampak dari pandemi COVID-19 yang sempat menghentikan program juga tidak dianalisis secara terpisah.

Dengan menyadari keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model collaborative governance yang lebih menyeluruh, berbasis data yang lebih luas, serta menguji efektivitasnya secara kuantitatif.